

KATEGORI

Pemerintah

SUB KATEGORI

Pelayanan Publik

NAMA INDIKATOR

Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda

TAHUN

2017

KONSEP

- **Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda** adalah sesuatu apresiasi yang diberikan pada pemerintah daerah dari pemerintah pusat atas suatu pencapaian tertentu.
- **Penghargaan** adalah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keulungan di bidang tertentu. Penghargaan biasanya diberikan dalam bentuk medali, piala, gelar, sertifikat, plaket atau pita. Suatu penghargaan kadang-kadang disertai dengan pemberian hadiah berupa uang seperti Hadiah Nobel untuk kontribusi terhadap masyarakat, dan Hadiah Pulitzer untuk penghargaan bidang literatur.
- **Pemerintah Pusat** adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- **Pemerintah Daerah (Pemda)** adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- **Pemerintah Daerah** adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

RUJUKAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Komunikasi Dan Informatika

UKURAN

-

UNIT

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika

KEGUNAAN

Untuk mengapresiasi kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

INTERPRETASI

Semakin banyak penghargaan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap tingkat pelayanan publik di wilayah tersebut sangat baik.

KETERANGAN

Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah terhadap Inovasi Daerah sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya setelah berkoordinasi dengan Menteri.

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Kementrian Komunikasi dan Informasi

DOKUMEN

LPPD

